BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah berkewajiban menjamin stabilitas Negara, membuat peraturan atau kebijakan yang mengatur masyarakat, dan melaksanakan pemerataan infrastruktur di segala bidang. Untuk menjalankan kekuasaan ini, pemerintah memerlukan banyak sumber daya. Beberapa sumber pendapatan pemerintah berasal dari berbagai hal, seperti sumber daya alam, Badan Usaha Milik Negara, dan retribusi yang dibebankan kepada setiap warga Negara. Pajak merupakan bagian dari pendapatan pemerintah, peranan perpajakan sangat penting dan berkembang seiring dengan tujuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Pajak dapat diartikan sebagai biaya yang di pungut pemerintah dari setiap warga Negara menurut undang-undang yang berlaku, dimana pemerintah memungut biaya tersebut dan tidak menimbulkan akibat langsung kepada wajib pajak. Terdapat dan masih banyak hambatan dalam meningkatkan penerimaan negara khususnya di dibidang perpajakan, antara lain rendahnya kepatuhan wajib pajak sehingga menyebabkan adanya upaya wajib pajak yang dibayarkannya, dan wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyatakan atau membayar pajak.

Tabel 1. 1 Penerimaan Negara Tahun 2022-2024

Sumber	Tahun		
	2022	2023	2024
Penerimaan Pajak	2.034.552.500	2.118.348.000	2.309.859.800
PNBP	595.594.500.000	515.800.900.000	492.003.100.000
Hibah	5.696.100.000	3.100.000.000	430.600.000.000

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar yang dimiliki oleh negara. Dapat dilihat dari tahun 2022-2024 penerimaan pajak mengalami peningkatan.

Perpajakan merupakan pedoman penting bagi pembangunan nasional, dan partisipasi wajib pajak merupakan syarat mutlak untuk memenuhi kewajiban

perpajakan. Salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan dari sektor pajak adalah kepatuhan wajib pajak yang disiplin dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Resmi, 2021). Pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan perpajakan juga dinilai penting dalam meningkatkan pemenuhan kewajiban wajib pajak. Karena informasi perpajakan merupakan hal penting mendasar yang harus dimiliki seorang wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. (Utami, 2019).

Perkembangan zaman juga mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan reformasi, membenahan administrasi sistem perpajakan untuk memudahkan wajib pajak dalam menyatakan dan membayar pajak. Perangkat lunak ini disebut sebagai *e-Filling* atau sistem pengarsipan elektronik yang diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam mempersiapkan pemrosesan, dan pelaporan pajak mereka ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. Demi menunjang kemudahan perpajakan tersebut, maka saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyediakan akses *e-Filling* secara online melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu www.pajak.go.id.

Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan E-Filing

Sumber	Tahun		
	2020	2021	2022
Jumlah Wajib Pajak	10.504.128	11.961.690	17.107.965

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2023

E-filling berperan penting untuk meminimalisir kecurangan data, memotong biaya serta waktu wajib pajak selama proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tepat waktu dan benar. Penggunaan *e-filling* dapat memudahkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, selain itu untuk perpindahan penyampaian dan pelaporan dari manual ke *e-spt* dapat memudahkan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengelola pajak.

Sayangnya, karena kurangnya informasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan dari wajib pajak sendiri, sebagian wajib pajak tidak bisa menerima sistem *e-filling* dan ragu untuk menggunakannya. Anda dapat melakukan ini dengan mengintegrasikan sistem teknologi baru ke dalam laporan pajak. Meskipun banyak wajib pajak yang menganggap penggunaan sistem registrasi

SPT elektronik lebih memberatkan dibandingkan pelaporan manual, pelaporan SPT digital menawarkan cara yang lebih hemat biaya bagi wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tabel 1. 3 Perkembangan Jumlah Penyampaian E-Filing

Sumber	Tahun		
	2020	2021	2022
Jumlah penyampaian <i>E-filing</i>	11.751.401	18.375.701	17.668.042

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2023

Respon wajib pajak terhadap sistem *E-Filing* sudah sangat meningkat secara positif dalam penggunaannya. Namun masih banyak orang yang menyikapi dan berpendapat bahwa sistem tersebut masih cukup sulit untuk digunakan, hal tersebut lah yang membuat pengguna sistem datang ke kantor pajak terdekat untuk meminta bantuan. Sikap negatif dari wajib pajak muncul karena minimnya pengetahuan dalam menggunakan sistem *E-Filing*. Hal tersebut membuat wajib pajak langsung menggambarkan bahwa sistem tersebut rumit dan sulit digunakan padahal belum mencobanya.

Tax Morale adalah motivasi internal individu untuk membatyar pajak secara sukarela, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, psikologis, dan institusional. Dalam penelitian ini, *Tax morale* sangat penting untuk memahami perilaku wajib pajak dan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. *Tax Morale* yang dikemukakan pada penelitian (Andriyani et al.,2019) mengemukakan bahwa *Tax Morale* adalah motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban, moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak sehingga kontribusi secara sekarela. Tingkat moral pajak yang tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak mereka. Namun, di Indonesia, *tax morale* seringkali dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan dan penggunaan dana publik. Jika wajib pajak merasa bahwa pajak yang dibayarkan tidak dikelola dengan baik, maka tingkat kepatuhan mereka cenderung menurun

Kepatuhan dalam membayar pajak tidak terlepas karna adanya sanksi dan pelayanan pajak. Hartini & Sopian (2020) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan dan norma perpajakan akan ditaati atau dituruti. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pada umumnya masyarakat akan mengikuti suatu peraturan jika didalamnya terdapat sanksi yang akan dijatuhkan jika tidak mematuhi peraturan tersebut. Namun denda perpajakan harus ditekankan secara maksimal, tidak hanya sekedar wacana agar wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Jika sanksi perpajakan diterapkan dengan baik, maka wajib pajak akan membayar pajaknya dengan patuh agar tidak ketahuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sanksi perpajakan juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajibannya demi memastikan penerimaan Negara. Banyaknya kasus yang membawa nama aparat pajak beberapa waktu yang lalu ini dapat membuat wajib pajak cenderung tidak memenuhi komitmen pajak mereka. Wajib pajak tidak ingin pajak yang dibayarkannya dimanfaatkan petugas pajak untuk konsumsi pribadi. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu berbenah untuk mendapatkan kembali kepercayaan wajib pajak. Sebagai sesama warga negara, kita tidak boleh sembarangan melakukan pelanggaran terhadap siapa pun, baik pegawai negeri maupun warga negara biasa. Dalam hal ini, sanksi pajak juga diterapkan untuk mendorong wajib pajak mematuhi kewajibannya. Sanksi pajak merupakan instrumen penting yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan secara keseluruhan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arini & Zumrotun (2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih & Jamil (2021) mendapatkan hasil yang berbeda mengenai sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, masih banyak wajib pajak yang diberikan Sanksi karna tidak melaporkan SPT tepat waktu. Wardani & Kartikasari

(2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Mariani et al. (2020) menyatakan kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran perpajakan akan timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Jika wajib pajak mulai memahami dan menyadari pentingnya membayar pajak, maka tingkatan kepatuhan para wajib dalam urusan perpajakannya akan meningkat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arini & Zumrotun (2021) menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020) mendapatkan hasil yang berbeda mengenai kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Karena menurut sebagian wajib pajak mereka tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memenuhi kewajibannya dalam urusan perpajakan.

Penelitian ini merupakan modifikasi terhadap penelitian yang dilakukan oleh (Agustini & Widhiyani, 2019). Perbedaan penelitian ini terletak pada perubahan variabel independen dan lokasi penelitian. Pada penelitian sebelumnya variabel yang digunakan adalah Pengaruh penerapan *E-filing*, Sosialisasi perpajakan, Sanksi Perpajakan. Sementara pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel Dampak Penggunaan *E-Filing*, *Tax Morale*, Dan Sanksi Pajak, dan dimoderasi oleh Kesadaran Perpajakan. Lokasi penelitian ini diambil dari Wajib Pajak di Kecamatan Bengkalis. Tujuan dari perubahan variabel-variabel tersebut karena penulis ingin mengetahui lebih dalam apakah hubungan *Tax Morale* dan Persepsi Kemudahan Sistem *E-Filing* sangat berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Perpajakan sebagai Variabel Moderasi.

Berdasarkan latar belakang diatas dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “**Dampak Penggunaan *E-FILLING*, *Tax Morale* dan Sanksi Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Bengkalis)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan sistem *E-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah *Tax Morale* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah Kesadaran Perpajakan dapat memoderasi Penggunaan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
5. Apakah Kesadaran Perpajakan dapat memoderasi pengaruh *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
6. Apakah Kesadaran Perpajakan dapat memoderasi pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

1.3. Batasan Masalah

Dalam Penelitian ini peneliti menyadari bahwa memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin saja dapat mempengaruhi hasil penelitian. Ada beberapa batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas dan masih terdapat faktor-faktor lain yang sesuai dengan topik penelitian yang belum dimasukkan.
2. Penelitian ini terbatas dan hanya dilakukan bagi wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Bengkalis.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan *e-Filing* terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Morale* terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui kesadaran perpajakan dalam memoderasi dampak penggunaan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk mengetahui kesadaran perpajakan dalam memoderasi pengaruh tax morale terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Untuk mengetahui kesadaran perpajakan dalam memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang menggunakannya, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan informasi kepada peneliti dan para akademisi terkait dengan hubungan antara pengaruh kemudahan dalam penerapan sistem *E-Filing*, *Tax Morale*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi yang mudah dipahami sehingga pemahaman wajib pajak semakin meningkat dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak juga dapat ditingkatkan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan saran kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan sosialisasi kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan khususnya layanan sistem *E-Filing* guna mempermudah Wajib Pajak Orang Pribadi dalam

melaporkan SPT tahunan, selain itu pihak Direktorat Jenderal Pajak juga harus bersikap tegas dan selalu mengamati para Wajib Pajak yang tidak taat pajak, sehingga pelayanan sanksi pajak terhadap WP yang tidak taat pajak akan berjalan sebagaimana mestinya.

1.6. Sistematika Penulisan

Ada pun sistematika penulisan yang terdapat pada skripsi yang berjudul “Dampak Penggunaan *E-Filling*, *Tax Morale* Dan Sanksi Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi”. Berikut ini adalah sistematika penulisan laporan proposal.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan landasan teori tentang pembahasan pengertian e-filling, Tax morale dan Sanksi pajak.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, jenis penelitian, definisi konsep dan definisi operasional.

BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini berisi uraian dan analisis hasil penelitian, baik secara kuantitatif maupun statistik, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Dapat diambil kesimpulan baik mengenai permasalahan yang muncul dalam penelitian maupun mengenai hasil penyelesaian penelitian. Sementara saran berisi solusi untuk

mengatasi permasalahan dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak terlepas dari ruang lingkup penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN